

## **Pemindahan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia: Berdasarkan Perspektif Psikologi**

### ***Translocation of The Government Center of The Republic of Indonesia: Based on Psychological Perspective***

Muhammad Nuh Arifiandi Hadiputra<sup>(1\*)</sup> & Nurul Aisyah<sup>(2)</sup>

<sup>1\*</sup>Teknik Arsitektur, Universitas Nakhdatul Ulama Sulawesi Tenggara, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Indonesia

Disubmit: 26 Oktober 2021; Diproses: 26 Oktober 2021; Diaccept: 23 November 2021; Dipublish: 02 Desember 2021

\*Corresponding author: E-mail: muh01nuh@gmail.com

#### **Abstrak**

Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bahwa akan melakukan pemindahan pusat pemerintahan. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai calon ibu kota Negara yang baru. Penetapan ini dilakukan atas dasar hasil berbagai kajian bahwa beban DKI Jakarta tidak mungkin lagi didesain ulang untuk menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Pemindahan Ibu Kota dilakukan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan ini penting untuk dianalisis karena ini dapat menjadi pertimbangan menciptakan strategi yang dapat meminimalisasi dampak negatif yang akan muncul dan mengoptimalkan pencapaian tujuannya. Hal ini mengingat pemindahan Ibu kota akan memicu pertumbuhan penduduk di wilayah baru. Analisis ini dilakukan dengan studi literatur dari perspektif psikologi dengan mempertimbangkan pengalaman pemindahan Ibu kota di beberapa negara seperti Malaysia, Kazakhtan, Brazil, Nigeria dan Korea Selatan. Hasil dari kajian ini meliputi identifikasi persamaan dan perbedaan Indonesia dan beberapa negara lain yang telah memindahkan Ibu Kota serta kemungkinan efektifnya kebijakan ini dalam mencapai tujuannya. Diakhir tulisan ini terdapat kesimpulan berupa rekomendasi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

**Kata Kunci:** Pemindahan; Pusat Pemerintahan; Indonesia; Perspektif Psikologi

#### **Abstract**

*The Government of the Republic of Indonesia has stated that it will move the center of government. Penajam Paser Utara and Kutai Kertanegara Regencies are designated as candidates for the new capital city of Indonesia. This determination was made based on the results of various researches that the burden of DKI Jakarta was no longer possible to be redesigned to arrange multiple functions at once. The transfer of the capital is carried out with the aim of increasing welfare that is equitable and sustainable. Therefore, this policy is important to analyze because it can be a consideration in creating a strategy that can minimize the negative impacts that will arise and achieve its objectives. This is because relocating the capital will trigger population growth in new areas. This analysis was carried out by studying literature from a psychological perspective by considering the experience of relocating the capital city in several countries such as Malaysia, Kazakhstan, Brazil, Nigeria and South Korea. The results of this study include the identification of similarities and differences between Indonesia and several other countries that have moved the capital city and the possibility of this policy being effective in achieving its objectives. At the end of this paper, there is a conclusion in the form of alternative policy recommendations that can be carried out by the government.*

**Keywords:** Translocation; Center of Government; Indonesia; Psychology Perspective

DOI: <https://doi.org/10.51849/j-p3k.v2i3.125>

#### **Rekomendasi mensitasi :**

Hadiputra, M.N.A. & Aisyah, N. (2021), Pemindahan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Perspective Psikologi. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K)*, 2 (3): 292-300.

## PENDAHULUAN

Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia saat ini memiliki luas wilayah kurang lebih 661,52 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 10.374.235 jiwa.(Badan Pusat Statistik, 2014) Merupakan wilayah metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau kedua di dunia.

Tergantung luas dan jumlah penduduk Jakarta, ruang sirkulasi menjadi semakin sempit. Jakarta dari zaman penjajahan hingga kemerdekaan terus berkembang, akibatnya penyusutan lahan hijau semakin luas karena lahan tersebut terus dibangun apapun peruntukannya. Akumulasi masyarakat, baik elit maupun kelas bawah, membuat masalah semakin kompleks. Bahkan pemberitaan nasional terkonsentrasi hanya pada Jakarta.

Bahkan pemberitaan nasional terkonsentrasi hanya pada Jakarta. Wacana pemindahan Ibukota tidak hanya muncul sekarang namun sejak Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno pernah mencanangkan gagasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Palangkaraya, yang dibelah oleh Sungai Kahyan. Saat itu, Sukarno meramalkan Jakarta akan semakin tak terkendali.

Jakarta, sebagai ibu kota negara, tampaknya semakin tidak layak. Kota ini memiliki segudang masalah mulai dari kemacetan akut, kepadatan penduduk, pembangunan yang tidak terencana hingga banjir yang selalu mengintai saat musim hujan tiba. Tahun ini, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengatakan calon ibu kota negara baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai

Kertanegara. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil penelitian Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR bahwa beban DKI Jakarta tidak bisa lagi didesain ulang untuk menjalankan beberapa fungsi sekaligus.

Selain aspek lingkungan, sistem sanitasi, transportasi dan perencanaan tata guna lahan yang sudah tidak layak lagi di masa mendatang, beban DKI Jakarta juga masih terbebani dari segi mobilitas penduduk, terutama bagi seluruh pegawai negeri sipil (ASN) atau pegawai negeri sipil.(PNS). Lebih dari 1,4 juta ASN tinggal dan bekerja di DKI Jakarta, baik di jajaran kementerian, lembaga negara, maupun perusahaan publik (BUMN).

Jumlah ASN tersebut belum termasuk ribuan pekerja honorer, pekerja harian, atau pekerja kontrak yang bekerja di berbagai Kementerian/Lembaga yang diperkirakan lebih dari 600.000. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi pemerintah pusat akan mempercepat pembangunan di daerah sasaran baru.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan pemindahan Pusat Pemerintahan ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Tujuan utamanya adalah agar setiap pemerintahan di masa mendatang mampu membuat program yang konsisten dan terhindar dari berbagai langkah paradoks dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera berkeadilan dengan perekonomian yang tumbuh berkelanjutan. Selain dari tujuan utama ada beberapa tujuan cabang yang meliputi, Pemerintah ingin melahirkan pusat kota baru, memudahkan pemerintah menata kota Jakarta dan kota besar lain di

Jawa, dan menghindari ketegangan yang makin tinggi akibat daya dukung alam dihadapkan dengan makin bertambahnya penduduk, dimana tujuan puncaknya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, dan lahirnya wajah Indonesia yang bisa dibanggakan. Selain itu, Presiden Jokowi berharap pemindahan Ibu Kota bukan hanya memindahkan secara fisik tetapi juga memindahkan budaya kerja, sistem kerja dan cara kerja.

Berdasarkan tujuan diatas, penulis menilai bahwa pemindahan ini penting untuk dianalisis karena dengan menganalisis kebijakan sebelum dilaksanakan maka dapat menjadi pertimbangan menciptakan strategi yang dapat meminimalisasi dampak negatif yang akan muncul. Hal ini mengingat pemindahan Ibu kota akan memicu pertumbuhan penduduk di wilayah baru. Selain itu, pada saat kebijakan ini akan diterapkan akan melibatkan banyak faktor manusia, bukan hanya faktor ekonomi, tapi juga faktor sosial budaya masyarakat pendatang dan masyarakat setempat. Selain itu, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah faktor kesiapan masyarakat pendatang ditempat baru maupun faktor kesiapan masyarakat setempat menerima pendatang baru.

Semua faktor ini dinilai perlu untuk diperhatikan mengingat tujuan utama kebijakan ini adalah peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Sehingga analisis ini kebijakan pada tulisan ini akan mempertanyakan apakah kebijakan Pemerintah dengan memindahkan pusat

pemerintahan ke Kalimantan Timur akan meningkatkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan?

Wacana pemindahan Ibu Kota keluar Jawa justru kekhawatiran tentang daya dukung ekosistem dan bencana sosial di kota-kota besar di Jawa [14]. Pasokan air bersih Jawa saat ini hanya mewakili 20% dari kebutuhan. Lahan pertanian di Jawa memiliki tingkat kesuburan lebih dari 3 kali lipat dari lahan di luar Jawa.

Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai. Sebagaimana umumnya kota megapolitan, Jakarta memiliki masalah stress, kriminalitas dan kemiskinan.

Penyimpangan dalam penggunaan lahan dan privatisasi lahan telah menguras pasokan taman kota, meningkatkan tingkat stres bagi warga Jakarta. Kemacetan lalu lintas, berkurangnya interaksi sosial akibat gaya hidup individualistis juga menjadi penyebab stres. Pembangunan kota yang tidak partisipatif dan tidak manusiawi menyisakan ruang-ruang sisa yang mengundang kriminal. Namun sejalan dengan keputusan kebijakan tersebut, penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyebutkan bahwa 67% PNS enggan pindah ke lokasi baru di luar Jawa karena berbagai pertimbangan keluarga. Oleh karena itu, perlu kesiapan mental dan kesadaran diri-keluarga yang kuat agar proses pemindahan ibu kota terintegrasi dengan kebutuhan dan harapan ASN dan pegawai beserta keluarganya. Artinya, kalau soal rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa, bukan

hanya soal relokasi pusat pemerintahan, terutama gedung dan fasilitas di dalamnya. Namun, yang justru lebih sulit adalah mutasi ASN/pegawai yang menjadi motor penggerak instansi pemerintah pusat. Bahkan, pemindahan ASN/karyawan tidak hanya menggusur ASN/karyawan itu sendiri, tetapi juga menggusur keluarganya. Karena ASN tinggal bersama keluarganya, maka perlu memperhatikan segala kebutuhan yang menyertainya, seperti kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ekonomi, dan lain-lain.

Dari permasalahan diatas, dengan pemindahan ibu kota, beberapa pihak akan diuntungkan namun beberapa pihak lain akan merasa dirugikan. Pihak yang merasa diuntungkan antara lain, Pemerintah akan merasakan pencapaian tujuan yang telah dirancang dari awal, pengusahan rekanan pemerintah dalam pembangunan yang akan mendapatkan ladang penghasilan, masyarakat yang akan menetap di jakarta karena akan merasakan suasana Jakarta yang lebih lowong dan lebih ramah lingkungan, serta masyarakat Kalimantan Timur dimana perputaran ekonomi setempat akan melaju lebih cepat. Selain itu, pihak lain yang akan dirugikan meliputi, masyarakat yang tidak siap dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah, seperti ASN dan keluarga yang belum siap serta masyarakat lokal Kalimantan Timur yang tidak siap menghadapi pendatang dengan identitas sosial yang dibawa bersamanya.

Di sisi lain ada beberapa risiko dari pemindahan ibu kota negara keluar Pulau Jawa. Risiko tersebut terkait dengan kesiapan daerah tujuan dari segi

infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung tata kelola. Dari sisi pendanaan, meski pemerintah menyatakan hanya 19,2% dari total kebutuhan anggaran Rp 446 triliun yang dibiayai APBN, ada risiko menambah beban pemerintah. Kegagalan pembangunan oleh sektor swasta.

Selain masalah ekonomi, Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Eko Prasajo mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan akan diikuti dengan perubahan sosial budaya yang cepat dan juga akan mendorong terjadinya konflik sosial Koubi et al. (2018). Hal ini karena dengan pemindahan Ibu Kota Negara akan memicu perpindahan penduduk secara masif Hernandez (2009). Mereka yang berpindah itu dipastikan membawa gaya dan budaya hidup baru yang dapat memicu konflik Koubi et al (2018). Sehingga jika tidak dilaksanakanebuah antisipasi maka dapat dipastikan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan tidak dapat terpenuhi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penlitian yang digunakan dengan pendekatan kajian studi literatur pada tinjauan pustaka dibentuklah pertanyaan penelitian yaitu 1).Apa yang dimaksud dengan penelitian studi literatur dan 2). Bagaimana penelitian dengan studi literatur sebagai karya ilmiah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Metode yang akan digunakan untuk pengkajian ini studi literatur. Data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibukota pernah dilakukan di beberapa negara seperti Brazil, Nigeria, Kazakhtan, Korea Selatan serta Malaysia. Brazil memindahkan Ibu kotanya dari Rio De Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960. Efek pada Brasília adalah signifikan, positif, dan persisten untuk populasi dan PDB. Namun, hal ini tidak menurunkan kepadatan penduduk di Rio de Janeiro. Tahun 1960 sebelum relokasi 3jt jiwa, pada tahun 2015 jumlah penduduk mencapai 12jt Jiwa. Menurut Kersten Knipp, jurnalis asal Jerman, peningkatan populasi Rio de Janeiro salah satunya disebabkan oleh peningkatan urbanisasi. Setelah tidak menjadi ibu kota, arus orang miskin ke Rio semakin tak terkendali. Seiring dengan itu, masalah sosial ekonomi juga berkembang, seperti masalah perumahan, meningkatnya jumlah permukiman kumuh dan meningkatnya angka kriminalitas. Kersten Knipp juga mencatat bahwa kondisi kumuh Rio mulai membaik pada tahun 2000-an.

Di Nigeria, sepanjang keunggulan Abuja sebagai Nigerian capital, kota ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam area dan penduduk, menjadi kota dengan pertumbuhan tercepat di Afrika Zone (2018). Namun, pemerintah Nigeria tidak cukup siap untuk menghadapi tantangan populasi yang terus bertambah dan, sebagai akibatnya, setidaknya 65 permukiman informal bermunculan di sekitar kota baru (COHRE/SERAC 2008). Proyek Abuja sendiri menciptakan rasa tidak aman bagi kedua penduduk setempat dengan paksa mengusir orang-

orang dengan kompensasi yang tidak memadai dengan tuduhan bias etnis - dan para pekerja migran yang tidak diintegrasikan ke dalam kota Gawęcki (2013).

Berbeda dengan Nigeria, Kazakhtan Negara yang dinilai cukup sukses memindahkan ibukota Arslan (2014). Selama hampir 22 tahun relokasi Ibukota, investasi di Kazakhtan kian tumbuh sebesar 10% atau setara dengan 47 milliar dolar AS (Rp. 660 Triliun). Di 2018, Nur Sultan menyumbang sekitar 9,8 % PDB Kazakhtan. Awalnya Nur Sultan hanya dihuni ribuan orang, kini dihuni oleh 1,1 juta jiwa dari 18 jt jiwa total penghuni Kazakhtan. Selain itu, Nur Sultan juga dinobatkan sebagai kota perdamaian oleh UNESCO tahun 1999.

Kazakhtan merupakan negara yang juga memiliki beragam suku didalamnya. Untuk meredakan ketegangan antar suku ketika pemindahan ibu Kota, Kazakhtan menciptakan simbol-simbol atau bangunan dengan gaya yang mencerminkan identitas bersama dari berbagai suku yang ada di kazakhtan Gawęcki (2013). Menurut Gawęcki, hal ini dilakukan untuk meningkatkan rasa kepemilikan bersama antar suku terhadap Ibu Kota baru Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjadikan pendatang baru yang awalnya pindah karena terpaksa merasa menjadi bagian dari Ibu Kota Kazakhtan yang Baru.

Pada negara Malaysia, Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya pada tahun 1999 ke Putrajaya dari Kuala Lumpur, yang tetap menjadi ibukota nasional di mana raja berada, serta pusat komersial dan keuangan negara tersebut. Oleh Dr Mahathir Mohamad selama masa

tugas pertamanya sebagai perdana menteri, langkah ini bertujuan untuk meredakan kemacetan kota Kuala Lumpur yang semakin besar. Saat ini urusan kenegaraan malaysia dinilai cukup efektif sejak pemindahan pusat pemerintahan, dimana setiap instansi berada pada wilayah yang berdekatan. Serta di Korea Selatan, pusat pemerintahan berpindah dari Seoul ke Kota Sejong. Proses pemindahan ibu kota ini membutuhkan waktu yang lama dan masih berlangsung hingga saat ini. Pembagian Ibu kota baru di kota Sejong dimulai pada 2007 dan ditargetkan selesai semua pada 2030. Hingga 2017, sudah empat puluh instansi pemerintah dan 15 lembaga penelitian pindah ke Sejong City.

#### b. Analisis Kebijakan dari Perspektif Psikologi

Tujuan dari pemindahan ibu kota Indonesia adalah untuk menumbuhkan perekonomian dan pemerataan kesejahteraan berkelanjutan. Salah satu indikator tercapainya tujuan ini adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk di suatu daerah, dalam hal ini di Kalimantan Timur, Arslan (2014). Jika dilihat, kebijakan ini sepertinya akan efektif karena akan memindahkan paling tidak 1,4 juta ASN dan karyawan BUMN ke Kalimantan Timur. Dengan kondisi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai kertanegara berjumlah tidak lebih dari satu juta jiwa, jika ditambahkan degan ASN dan karyawan BUMN pusat akan menambah jumlah penduduk lebih dari dua kali lipat. Namun kenyataannya 65 persen dari ASN pusat dan karyawan BUMN mengaku belum siap untuk dipindahkan dikarenakan faktor keluarga [8]. Selain dari pemindahan Ibu

Kota secara fisik atau pemindahan penduduk, Presiden Jokowi juga berharap pemindahan Ibu Kota negara diikuti dengan pemindahan budaya kerja, sistem kerja dan cara kerja para PNS ataupun karyawan BUMN pusat ke wilayah Ibu Kota baru. Untuk melihat kebijakan ini apakah dapat mewujudkan tujuan yang telah dirancang dapat dilihat dari sudut pandang psikologi, khususnya motivasi untuk pindah dan kelekatan emosional dari masyarakat setempat dari Penajam Paser Utara dan Kutai serta masyarakat yang direncanakan akan pindah dari Jakarta.

Dalam perspektif psikologi, McClelland berpendapat bahwa motif perpindahan penduduk berinteraksi dengan nilai-nilai untuk menghasilkan perilaku Hernandez (2009). Keputusan penduduk untuk berpindah sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Untuk memahami dengan lebih baik bagaimana motif pencapaian, kekuatan, dan afiliasi bekerja bersama dengan nilai-nilai dasar untuk memengaruhi pilihan untuk bermigrasi. Telah diketahui secara luas bahwa alasan utama untuk memilih bermigrasi ke daerah lain adalah untuk meningkatkan peluang kerja

Carvalho e Silva & Bucher-Maluschke,(2018). Dengan demikian, mereka yang melihat pekerjaan lebih sentral dalam kehidupan mereka akan lebih cenderung berhasrat untuk pindah ke daerah yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik daripada mereka yang tidak melihat pekerjaan sebagai pusat Lee et al., (2006).

Seseorang atau kelompok yang ingin bermigrasi memiliki nilai yang berorientasi pada kerja, pencapaian serta



motivasi kekuasaan dan pada orang yang memilih tinggal merupakan orang yang nilainya tidak terpusat pada pekerjaan dan pencapaian Fulmer et al.(2010). Nowok dkk juga mengungkapkan bahwa orang yang sangat berafiliasi menghargai keluarga maka akan lebih memutuskan untuk tinggal dan tidak berpindah ke daerah lain Nowok et al.(2013). Jika keluarga merupakan hal yang sentral bagi seorang individu, ia tidak ingin meninggalkannya. Melihat dari survey yang dilakukan oleh YLKI, menunjukkan bahwa diperkirakan 65 persen orang yang mengaku belum siap pindah ke Kalimantan Timur merupakan orang yang berorientasi pada keluarga sebagai pusatnya.

Mengingat Indonesia yang memiliki budaya kolektif, maka penduduk Indonesia akan berpindah jika bersama dengan kelompoknya dalam hal ini keluarga. Bersamadengan hal tersebut, keluarga dinilai sebagai sebuah sistem yang memiliki ikatan emosional yang kuat. Berdasarkan dari teori diatas, bahwa kebijakan memindahkan Ibu Kota Negara akan berhasil jika perpindahan penduduk dalam hal ini ASN dan karyawan BUMN serta pekerja lainnya diiringi dengan perpindahan keluarga yang dimilikinya. Untuk itu, diperlukan kesiapan mental dan kesadaran diri-keluarga yang kuat agar proses pemindahan ibu kota tersebut terintegrasi dengan kebutuhan dan harapan segenap ASN itu sendiri.

Artinya, berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa, tak sekedar memindahkan pusat pemerintahan, khususnya gedung dan sarana fasilitas di dalamnya. Namun, tantangannya adalah memobilisasi

ASN/pegawai yang menjadi motor penggerak di belakang instansi pemerintah yang terkait dengan administrasi pusat. Padahal, perpindahan ASN/pegawai tidak sebatas pindah ASN dan/atau pegawai itu sendiri, tetapi juga harus pindah keluarganya. Karena ASN tinggal bersama keluarganya, maka semua kebutuhan yang menyertainya harus diperhatikan, seperti kebutuhan perumahan, kebutuhan kesehatan, ekonomi, dll. Ketika seorang ASN dan keluarganya pindah tempat kerja, tempat tinggal lain juga harus disediakan pada saat yang bersamaan. waktu.

Selain pemindahan keluarga sebagai bentuk intervensi kelekatan emosional untuk menyukseskan pemindahan ibu kota, hal yang perlu dicontoh dari keberhasilan Kazakhtan adalah penciptaan simbol identitas bersama antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Menurut Meis & Kashima simbol atau tanda dapat menjadi sesuatu yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan perilaku Meis & Kashima (2017). Penggunaan simbol dan ikon pada bangunan di Kazakhtan menjadi upaya untuk mempengaruhi perilaku masyarakat agar merasa bahwa Nur Sultana sebagai Ibukota baru adalah tempat bersama yang harus dilindungi bersama. Simbol atau ikon yang digunakan pun merupakan hal yang baru dan merupakan gabungan dari simbol-simbol yang berlaku di semua suku. Hal ini menuntun masyarakat Nur Sultan, Kazakhtan, meskipun berbeda latar belakang suku, namun secara bersama merasa bagian dari Nur Sultan Gawęcki (2013). Sehingga Masyarakat yang awalnya pindah dengan terpaksa karena

pekerjaan dapat merasa bahwa Nur Sultan adalah 'rumah' dan merasa betah ditempat baru.

Hal serupa dinilai dapat juga menjadi bagian dari rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia. Dengan menghadirkan simbol baru yang merupakan simbol yang digunakan semua kelompok (mengingat di Penajam Paser Utara dan sekitarnya ada berbagai suku, ditambah lagi masyarakat pendatang dengan latar belakang suku budaya agama yang lebih beragam lagi) yang bersifat netral dan tidak menunjukkan dominasi kelompok tertentu. Hal ini dinilai dapat menjadikan masyarakat Ibu Kota baru mempersonalisasikan tempat baru menjadi bagian dari mereka dan tempat dimana mereka dapat berada. Hal ini didukung oleh pendapat Mugge, Schoormans & Schifferstein yang mengatakan bahwa personalisasi wilayah baru dapat berfungsi sebagai strategi desain potensial untuk merangsang ikatan emosional dengan wilayah atau suasana baru Mugge et al. (2009). Dengan mempersonalisasikan suatu wilayah, seseorang menginvestasikan upaya dalam wilayah tersebut. Karena orang mengevaluasi suatu wilayah sebagai lebih menguntungkan ketika mereka telah menghabiskan waktu yang lama dengannya, upaya yang diinvestasikan secara langsung memengaruhi kekuatan ikatan emosional dengan wilayah dan suasana tersebut.

Selain itu, Mugge, Schoormans & Schifferstein menunjukkan bahwa pengaruh upaya pada ikatan emosional dapat sebagian dijelaskan oleh nilai ekspresif diri wilayah atau tempat baru sebagai berikut: Semakin banyak upaya

seseorang berinvestasi dalam wilayah tersebut (seperti menjaga kebersamaan dan keharmonisan) selama proses personalisasi, semakin banyak nilai ekspresif diri yang diperoleh tempat baru ini, dan semakin kuat ikatan emosional dengan tempat baru Mugge et al (2009), dalam hal ini Ibu Kota baru. Oleh karena itu, dengan melihat banyaknya negara yang berhasil memindahkan Ibu Kota negara, penulis melihat bahwa Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama dengan berbagai pertimbangan dan pemanfaatan modal fisik, modal finansial dan modal sosial yang telah dimiliki oleh Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh opsi kebijakan adalah pemindahan Ibu Kota Negara secara bertahap dengan memindahkan instansi pemerintahan pusat, BUMN pusat dan kantor Kedutaan, dimana yang akan pindah adalah para Pegawai dan Karyawan beserta keluarganya, dengan segala urusan administrasi yang mudah serta ketersediaan sarana dan prasarana yang layak. Hal ini dapat mendukung harapan Presiden Jokowi dimana pemindahan Ibu Kota bukan hanya memindahkan fisik Ibu Kota tetapi juga fungsi.

Opsi kebijakan lainnya adalah sebelum pemindahan Ibu Kota Negara, pemerintah perlu merancang simbol atau ikon kota yang dapat menimbulkan *sense of belonging* bersama terhadap tempat baru yang ditunjuk sebagai ibu kota negara. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat adaptasi warga lokal maupun pendatang terhadap perubahan yang mungkin terjadi saat pemindahan Ibu Kota baru.



## SIMPULAN

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemindahan Ibu Kota sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara dinilai dapat efektif untuk mencapai pemerataan kesejahteraan Rakyat Indonesia yang sebelumnya terpusat di Pulau Jawa. Kesimpulan tersebut diikuti dengan beberapa rekomendasi, yaitu:

- a. Pemindahan Ibu Kota dengan memindahkan masyarakat dari Ibu Kota lama ke Ibu kota Baru dibarengi dengan kemudahan administrasi perpindahan penduduk dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menghadapi gelombang perpindahan penduduk dari kota lama ke kota baru.
- b. Perencanaan tata ruang kota sebaiknya direncanakan sebaik mungkin dengan memperhatikan pemerataan pembangunan yang tidak didominasi dengan simbol kelompok tertentu. Tetapi dibutuhkan rancangan simbol baru pada struktur fisik kota baru yang dipersonalisasi dan diakui oleh setiap kelompok tertentu baik suku, agama, ras, serta etnis sebagai identitas bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arslan, M. (2014). The Significance of Shifting Capital of Kazakstan from Almaty to Astana: An Evaluation on the basis of Geopolitical and Demographic Developments. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 120, 98-109. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.086>
- Badan Pusat Statistik. (2014). Kajian indikator Sustainable Development Goals (SDGs). *Badan Pusat Statistik*, 1-172.
- Carvalho e Silva, J., & Bucher-Maluschke, J. S. N. F. (2018). Psychology of forced displacement and migration: A systematic review of the scientific literature. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, 35(2), 127-136. <https://doi.org/10.1590/1982-02752018000200002>
- Fulmer, C. A., Gelfand, M. J., Kruglanski, A. W., Kim-Prieto, C., Diener, E., Pierro, A., & Higgins, E. T. (2010). On "feeling right" in cultural contexts: How person-culture match affects self-esteem and subjective well-being. *Psychological Science*, 21(11), 1563-1569. <https://doi.org/10.1177/0956797610384742>
- Gawęcki, M. (2013). New Urbanization of the Steppe. Astana: A Capital Called the Capital. *Sho*, 31(1), 35-56. <https://doi.org/10.2478/sho-2013-0003>
- Hernandez, M. Y. (2009). Psychological theories of immigration. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 19(6), 713-729. <https://doi.org/10.1080/10911350902910898>
- Koubi, V., Böhmelt, T., Spilker, G., & Schaffer, L. (2018). The Determinants of Environmental Migrants' Conflict Perception. *International Organization*, 72(4), 905-936. <https://doi.org/10.1017/S0020818318000231>
- Lee, Y., Kim, T., & Yoon, J. (2006). Development of a Ventilation Performance Prediction Equation for Korean Multi-Family Housing Units Using Airflow Analysis. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 5(2), 369-375. <https://doi.org/10.3130/jaabe.5.369>
- Meis, J., & Kashima, Y. (2017). Signage as a tool for behavioral change: Direct and indirect routes to understanding the meaning of a sign. *PLoS ONE*, 12(8), 1-16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182975>
- Mugge, R., Schoormans, J. P. L., & Schifferstein, H. N. J. (2009). Emotional bonding with personalised products. *Journal of Engineering Design*, 20(5), 467-476. <https://doi.org/10.1080/0954482080269850>
- Nowok, B., van Ham, M., Findlay, A. M., & Gayle, V. (2013). Does migration make you happy? a longitudinal study of internal migration and subjective well-being. *Environment and Planning A*, 45(4), 986-1002. <https://doi.org/10.1068/a45287>
- Zone, U. G. (2018). African Cities and the Development Conundrum. *African Cities and the Development Conundrum, January*. <https://doi.org/10.1163/9789004387942>